

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas merupakan sebuah tingkah laku individu tertentu yang telah melanggar norma-norma sosial dan norma hukum sehingga masyarakat dengan tegas menentang setiap tindak kriminalitas yang ada. Fenomena kriminalitas telah berlangsung sejak lama walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya. Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak maka tidak lepas dari masalah kriminalitas. Indonesia berada pada peringkat 68 dari 147 negara. Posisi Indonesia itu terlihat pula dalam perkembangan angka kejahatan dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2015 dalam 1 menit 32 detik terjadi satu tindakan kriminal di Indonesia. Sementara itu dari 100.000 orang di Indonesia, maka 140 orang diantaranya beresiko terkena tindakan kejahatan (BPS, 2015). Angka-angka ini didasarkan pada laporan yang masuk ke kepolisian. Angka kriminalitas di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Terutama 5 provinsi yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia yaitu provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Tindak kriminalitas dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi para kriminal melakukan tindakan tersebut. Berbagai faktor tersebut adalah kemiskinan, kesempatan kerja, dan karakter pelaku yang melakukan kejahatan. Selain itu ada pula faktor lain yang mempengaruhi

timbulnya kejahatan yaitu kepadatan penduduk, jumlah patroli polisi, keadaan jalan dan lingkungan, frekuensi ronda siskamling, dan faktor lainnya (Soekanto, (2001) dalam Todotoa, (2016)). Salah satu faktor lainnya yaitu pengangguran karena dapat menjadi sumber utama kemiskinan, sehingga memicu kriminalitas yang tinggi serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Tabel 1.1
Data Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Pendapatan dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas 5 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2017

Provinsi	Kriminalitas (Kasus)		TPT (%)		Rasio Gini(%)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
DKI Jakarta	43.842	34.767	6,12	7,14	0,397	0,413	15.478	15.624
Sumut	37.102	39.867	5,84	5,60	0,312	0,315	193	196
Jatim	28.902	34.598	4,21	4,00	0,402	0,369	817	822
Sulsel	15.071	21.616	4,80	5,61	0,400	0,407	184	186
Jabar	29.351	25.183	8,89	8,22	0,402	0,403	1.339	1.358

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Statistik Kriminal Indonesia, 2020

Dari tabel 1.1 diatas, bisa dilihat bahwa tingkat kriminalitas tertinggi tahun 2017 terdapat pada provinsi Sumatera Utara sebesar 39.867 kasus. Sedangkan tingkat kriminalitas terendah tahun 2017 terdapat pada provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 21.616 kasus. Pada variabel tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 data paling tinggi ada pada provinsi Jawa Barat sebesar 8,22 % dan terendah pada provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,400 %. Kemudian pada variabel ketimpangan pendapatan data tertinggi di tahun 2017 berada pada provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,429 % dan data terendah tahun 2017 berada pada provinsi Sumatera Utara sebesar 0,335 %. Selanjutnya variabel kepadatan

penduduk tahun 2017 data paling tinggi berada pada provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 15.624 jiwa/km² sedangkan data paling rendah berada pada provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 186 jiwa/km².

Menurut BPS tingkat pengangguran merupakan bagian daripada angkatan kerja yang tidak mempunyai kerja, sedang mencari kerja, dan berusaha untuk memperoleh suatu pekerjaan serta bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu.. Menurut Sadono (2011: 327) pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena disebabkan adanya factor-faktor yang saling terkait dan memiliki beberapa efek buruk terhadap perekonomian, politik, dan sosial. Misalnya dengan banyaknya pengangguran maka mengakibatkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat akan berkurang dan akibat lainnya akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Pengangguran selalu berkaitan atau berhubungan terhadap kriminalitas karena kurangnya tersedia lapangan kerja dan tidak diiringi dengan tingginya angka lulusan siap kerja, serta belum meratanya pertumbuhan ekonomi. Tingginya jumlah pengangguran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi masyarakat maupun bagi negara. Tingkat pengangguran juga mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kriminalitas pada suatu daerah (Wolpin (1978) dan Wong (1995) (dalam Hardianto, 2009).

Dari tabel diatas terdapat fenomena pada variabel tingkat pengangguran terbuka bahwa provinsi Sumatera Utara, dan Jawa Timur mengalami penurunan sedangkan kriminalitas mengalami peningkatan. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Harahap (2014) dimana menyatakan pada variabel tingkat

pengangguran berpengaruh negatif terhadap kriminalitas yang mana orang yang tidak bekerja tidak seketika untuk berfikir melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal.

Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Arvanties dan Defina (dalam Hooghe, dkk (2010)) bahwa tingkat pengangguran yang tinggi juga memberikan insentif untuk melakukan semua jenis tindak kriminal. Hal ini juga berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Steviani, Ega dkk (2020) bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap tindak kejahatan pada Provinsi Sumatera Barat. Artinya, perubahan yang terjadi pada pengangguran akan mengakibatkan perubahan pada tindak kejahatan, ketika pengangguran meningkat maka tindak kejahatan di juga akan meningkat.

Ketimpangan pendapatan merupakan tingkat standar hidup relatif di kalangan masyarakat, ketidaksetaraan yang terjadi antar daerah disebabkan adanya perbedaan sumber daya yang tersedia dan perbedaan pada factor produksi (Kuncoro, 2006). Menurut Sadono (2006), Ketimpangan pendapatan adalah sebuah konsep dimana menjelaskan tentang penyebaran pendapatan pada setiap individu di kalangan masyarakat.

Hubungan ketimpangan pendapatan dan tingkat kriminalitas yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kang (2014) dalam Edwart dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketimpangan penduduk memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas. Ketimpangan pendapatan terjadi akibat dari ketidaksejahteraan pendapatan antar wilayah, diskriminasi ekonomi dalam

lingkungan wilayah politik serta kemiskinan terhadap tindak kriminalitas atau kekerasan bermasyarakat. Salah satu yang menjadi masalah di Indonesia adalah masalah kepadatan penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk mengakibatkan kepadatan penduduk juga ikut tinggi. Jadi tingginya angka kepadatan penduduk pada suatu wilayah otomatis secara tidak langsung juga ikut memberikan pengaruh terhadap tingkat kriminalitas.

Selanjutnya pada tabel 1.1 bisa dilihat juga terdapat fenomena pada variabel ketimpangan pendapatan pada Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan namun tingkat kriminalitas mengalami penurunan. Searah dengan hasil penelitian Sari, Ratna Indah, (2018) Distribusi pendapatan berpengaruh secara negatif serta tidak signifikan terhadap angka kriminalitas. Hal ini disebabkan semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin rendah terjadinya kriminalitas di Sulawesi Selatan. Penelitian ini searah dengan penelitian Aranthya, Priscilla Dwi dkk (2018) bahwa rasio gini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro & Smith, (2011, p. 205) yang menyatakan bahwan semakin besar proporsi pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan tertinggi terhadap pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan terendah berarti bahwa ketimpangan semakin besar. Penelitian ini tidak sesuai dengan Becker (dalam Kang, 2014) tindakan kriminalitas lebih didorong oleh besarnya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di suatu daerah karena

semakin besarnya frustrasi akibat ketimpangan maka memberikan pengaruh agar melakukan tindakan kejahatan.

Jumlah kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kriminalitas karena daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung mengalami permasalahan ekonomi, kesejahteraan, kebutuhan pangan serta kurangnya tingkat keamanan yang berujung pada tindakan kriminalitas. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati. Kepadatan penduduk juga menunjukkan jumlah rata-rata penduduk yang dapat dipengaruhi oleh kebudayaan, fisiografis, dan lain-lain. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan wilayah yang di tempati (Mantra, 2007).

Hubungan tingkat kepadatan penduduk terhadap kriminalitas yaitu semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah maka dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas, karena semakin padatnya penduduk disuatu daerah mengakibatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin susah dan pengasilan akan semakin sedikit, sehingga banyak individu yang berinisiatif melakukan perbuatan kejahatan disebabkan ketatnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian terdapat juga fenomena pada tabel 1.1 variabel kepadatan penduduk di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mengalami peningkatan sedangkan tingkat kriminalitas mengalami penurunan karena daerah yang tingkat kepadatan jumlah penduduk tinggi kontrol lingkunganya lebih besar dan tingkat pengawasan keamanan yang tinggi sehingga tercipta rasa aman dari tindak

kriminalitas bagi orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Audey, dkk (2019) dengan hasil penelitiannya bahwa kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Todotoa, (2016) hasilnya ada pengaruh secara positif variabel kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas yaitu tindakan kejahatan terutama di perkotaan yang diikuti dengan peningkatan kemiskinan. Selanjutnya menurut hasil penelitian Fajri, dkk (2019) Kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Artinya semakin tinggi kepadatan penduduk di empat kota di Provinsi Aceh, maka kriminalitas di empat kota di Provinsi Aceh juga meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Pendapatan dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kriminalitas di Indonesia ?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Indonesia ?

3. Seberapa besar pengaruh tingkat Kepadatan Penduduk terhadap Kriminalitas di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Kriminalitas di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta dapat menambah ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk jadi pembandingan dengan penelitian yang hampir sama selanjutnya.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran akademik.

4. Penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber untuk dapat mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia

b. Manfaat Dinamis

1. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi pelajar, sebagai contoh dalam pembuatan karya ilmiah serta bisa untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
3. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam menganalisa mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas dan agar dapat mengambil kebijaksanaan dalam mengatasi masalah tersebut di provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
4. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan penulisan karya ilmiah dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, kepadatan penduduk dan kriminalitas.